

## MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH SEBAGAI BENTUK DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Nova Nurhakim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya, [ovelnurhakim@gmail.com](mailto:ovelnurhakim@gmail.com)

**Abstract:** Madrasah-based management is one of the efforts made so that madrasahs can grow and develop independently. This writing aims to describe the application of madrasah-based management as a form of educational decentralization. This research method uses descriptive research using a literature study approach. The results of this research are: 1) Madrasah-based management is the result of decentralization; 2) One of the implementations of madrasah-based management is realized in the realm of madrasah financing; 3) Ciputat Development Madrasah is one of the institutions that implement madrasah-based management in the realm of good financing, one indicator is that they have 5 sources of financing (contributions from accepted students, tuition fees, BOS funds, new school year money, and sponsors). 4) Development madrasah invest some of the BOS funds they receive in accordance with the dimensions of restructuring the old pattern into a new pattern of madrasah-based management.

**Keywords:** Management, Decentralization, Education

**Abstrak:** Manajemen berbasis madrasah merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar madrasah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan penerapan manajemen berbasis madrasah sebagai bentuk desentralisasi pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah: 1) Manajemen Berbasis Madrasah merupakan hasil dari desentralisasi; 2) Penerapan manajemen berbasis madrasah salah satunya terealisasi pada ranah pembiayaan madrasah; 3) Madrasah Pembangunan Ciputat merupakan salah satu lembaga yang menerapkan manajemen berbasis madrasah pada ranah pembiayaannya baik, salah satu indikatornya mereka memiliki 5 sumber pembiayaan (Sumbangan siswa yang diterima, SPP, dana BOS, uang tahun ajaran baru, dan Sponsor). 4) Madrasah pembangunan menginvestasikan sebagian dana BOS yang diterima hal tersebut sesuai dengan dimensi penataan pola lama ke pola baru manajemen berbasis madrasah.

**Kata Kunci:** Manajemen, Desentralisasi, Pendidikan

## Pendahuluan

Adanya dualisme pendidikan di Indonesia tentunya mengakibatkan persaingan yang sangat ketat pada keduanya. Madrasah sebagai lembaga pendidikan umum yang berciri khas Islam sampai saat ini masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Salah satu contohnya dapat kita cermati pada beberapa daerah yang jumlah peminat ke sekolah umum lebih banyak dibandingkan ke madrasah.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, mereka menganggap kualitas pendidikan di sekolah lebih baik dibandingkan madrasah. Dari kenyataan tersebut, maka perlu adanya inovasi dan kreatifitas dari madrasah tersebut, sehingga sentimen tersebut tidak ada lagi di masyarakat. Upaya tersebut tentunya di dorong dengan adanya desentralisasi pendidikan yang bisa dipraktikkan di madrasah.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan Desentralisasi menurut Hasibuan, adalah suatu proses dimana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan.<sup>2</sup>

Desentralisasi pada ranah pemerintahan tentunya akan sangat berbeda dengan desentralisasi pendidikan, bentuk dari desentralisasi pada dunia pendidikan yaitu manajemen berbasis madrasah.<sup>3</sup> Artikel ini bertujuan untuk menguraikan Manajemen Berbasis madrasah yang lahir dari desentralisasi pendidikan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menguraikan tentang manajemen berbasis madrasah sebagai bentuk desentralisasi pendidikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” (n.d.).

<sup>2</sup> Nur Erwannudin and Bimo Wahyu Widodo, “Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas,” *Jurnal Penelitian* 10, no. 1 (March 27, 2016), <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i1.866>.

<sup>3</sup> Ahmad Zaini Aziz, “Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah,” *EL-Tarbawi* 8, no. 1 (December 31, 2015): 69–92, <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5>.

studi kepustakaan (*Library Research*), dimana studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur dan publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber untuk penelitian yang akan di teliti.<sup>4</sup>

## Hasil dan Diskusi

### Manajemen Berbasis Madrasah

Manajemen berbasis madrasah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan madrasah. Manajemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan. Berbasis berarti “berdasarkan pada”.<sup>5</sup> Madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang sesuai zamannya.<sup>6</sup>

Madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal dan memiliki konotasi spesifik. Meski beragam pendapat mengenai definisi madrasah, penulis pada bahasan buku ini akan membahas madrasah dalam konteks lembaga pendidikan. Di Indonesia sendiri, madrasah merupakan padanan dari sekolah. Keduanya merupakan tempat belajar baik secara formal maupun nonformal. Secara teknis, pembelajaran antara sekolah dengan madrasah tidak ada bedanya, namun yang membedakan hanyalah muatan kurikulumnya saja serta lembaga yang menaunginya.<sup>7</sup> Sehingga hal ini juga seharusnya dalam pengelolaan tidak ada bedanya, terutama dalam implementasi MBS atau MBM.

Jika dilihat dari lahirnya, manajemen berbasis madrasah ialah manajemen berbasis sekolah, dimana hal ini sebagai bentuk ikhtiar dalam perwujudan agenda

<sup>4</sup> Maklonia Meling Moto, “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan,” *Indonesian Journal of Primary Education* 3, no. 1 (June 30, 2019): 20–28, <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i1.16060>.

<sup>5</sup> Nur Munajat, “Kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam,” *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 8, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.14421/albidayah.v8i2.74>.

<sup>6</sup> Irawan Irawan, “Paradigma Keilmuan Manajemen Pendidikan Islam,” *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (February 11, 2017): 297–315, <https://doi.org/10.14421/manageria.2016.12-07>.

<sup>7</sup> Iwan Sopwandin, *Manajemen Madrasah Teori dan Strategi Pengelolaan Madrasah di Era Digital* (CV Widina Media Utama, 2023), <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/567035/>.

reformasi pendidikan untuk menentukan arah pengembangan sekolah agar selaras dengan tuntutan, kebutuhan masyarakat serta potensi yang ada.<sup>8</sup>

Manajemen berbasis madrasah diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan oleh sekolah/madrasah secara mandiri dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah/madrasah (stakeholders) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah/madrasah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.<sup>9</sup> Sedangkan menurut David, esensi dari manajemen madrasah adalah otonomi madrasah plus pengambilan keputusan partisipatif.<sup>10</sup>

Jadi otonomi madrasah merupakan kewenangan madrasah untuk mengelola dan mengembangkan sendiri madrasah tersebut tanpa melanggar undang-undang pendidikan yang berlaku serta dengan pengambilan keputusan yang terbuka dan demokratis. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) menganut prinsip kemandirian, kerja sama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kualitas di madrasah. Manajemen madrasah merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif tentunya untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya diperlukan kepemimpinan yang efektif.<sup>11</sup> Manajemen madrasah yang efektif adalah pengelolaan, penataan, dan penyelenggaraan madrasah yang terprogram, terencana secara baik, terkoordinir, terintegrasi, termonitoring, dan terevaluasi serta terorganisasi secara terpadu dengan baik, lancar, dan dilaksanakan dengan cepat waktu, tepat teknik cara dan strategi serta dilaksanakan oleh orang yang tepat pula.<sup>12</sup>

Manajemen berbasis madrasah sebagai salah satu bentuk penerapan dari Desentralisasi pendidikan mempunyai penataan dimensi manajemen pendidikan dari pola lama (sebelum Desentralisasi Pendidikan) ke pola baru (era desentralisasi).

---

<sup>8</sup> Shelly Deity Meity Sumual, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran," *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 12, no. 1 (April 30, 2023): 95, <https://doi.org/10.24036/jbmp.v12i1.122687>.

<sup>9</sup> MM Wahyuningrum, "Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dan Desentralisasi Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. II (2006): 41–49.

<sup>10</sup> Munajat, "Kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam."

<sup>11</sup> Mutiara Fauziah et al., "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah Berbasis Pendekatan Kolaboratif Dan Kekeluargaan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru," *Tadbir Munabbid* 4, no. 2 (2020): 117, <https://doi.org/10.30997/jtm.v4i2.2879>.

<sup>12</sup> Toto Alwi, Saipul Annur, and Ramdhan Firdaus, "Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Jurnal Al-Hikam* 2, no. 2 (2021).

Penataan dimensi-dimensi manajemen pendidikan oleh Depdiknas ialah sebagai berikut:<sup>13</sup>

Tabel 1. Pola lama dan pola baru penataan dimensi manajemen pendidikan

Pola lama	Pola Baru
Subordinasi	Otonomi
Pengambilan Keputusan terpusat	Pengambilan keputusan partisipatif
Pendekatan birokratif	Pendekatan professional
Ruang gerak kaku	Ruang gerak luwes
Sentralistik	Desentralistik
Diatur	Motivasi Diri
Overregulasi	Deregulasi
Mengontrol	Mempengaruhi
Mengarahkan	Memfasilitasi
Menghindari resiko	Mengelola resiko
Gunakan uang semuanya	Gunakan uang seefisien mungkin
Individual yang cerdas	Teamwork yang cerdas
Informasi terpribadi	Informasi terbagi
Pendelegasian	pemberdayaan
Organisasi hierarkis	Organisasi datar

## Desentralisasi

### A. Kewenangan Desentralisasi

Wewenang desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Desentralisasi dilakukan dalam kerangka negara kesatuan. Desentralisasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Desentralisasi politik: Masyarakat di daerah dapat memilih pemimpinnya secara langsung.
2. Desentralisasi administrasi: Beberapa kewenangan administrasi dilimpahkan kepada aparat di daerah.
3. Desentralisasi fiskal: Kewenangan fiskal diserahkan dari otoritas negara kepada daerah otonom.

<sup>13</sup> Wahyuningrum, "Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dan Desentralisasi Pendidikan pada Era Otonomi Daerah."

## Manajemen Berbasis Madrasah sebagai Bentuk Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi memiliki beberapa kelebihan, di antaranya: 1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, 2) Memperpendek birokrasi, 3) Meringankan pekerjaan pemerintah pusat, 4) Kemajuan daerah dapat merata, 5) Mendorong pemahaman kedaerahan.

Sebagai suatu investasi, peningkatan pengetahuan SDM mutlak diperlukan dan salah satu tujuan dari desentralisasi sendiri adalah kemandirian daerah. Agar daerah itu dapat mandiri tentu saja diperlukan manusia-manusia yang handal untuk pembangunan daerah tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya tidak hanya SDM handal saja yang diperlukan, tetapi juga sumber daya lainnya seperti keuangan dan sarana prasarana serta unsur-unsur kelembagaan yang ada. Faktor yang mempengaruhi otonomi daerah adalah terpenuhinya SDM, keuangan yang cukup, sarana dan prasarana serta kelembagaan yang memadai.<sup>14</sup>

### B. Kondisi Disentralisasi pendidikan

Salah satu aspek yang mengalami perubahan sangat signifikan pada era otonomi daerah dan desentralisasi adalah peran dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Bila di masa lalu pemerintah pusat sangat berperan dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan nasional, maka dewasa ini peran pemerintah pusat lebih terfokus kepada penetapan kebijakan strategis yang bersifat nasional. Di pihak lain, hal-hal yang bersifat teknis dalam pengelolaan pendidikan ditangani oleh daerah dengan titik berat pada tingkat Kabupaten/Kota.<sup>15</sup>

Sementara itu dengan diserahkannya urusan pendidikan ke daerah, maka diharapkan daerah akan menjadi lebih leluasa untuk mengatur kewenangan tersebut. Meskipun demikian, desentralisasi pendidikan ini tidak berarti menciutkan substansi yang bersifat primordial, yang dapat menumbuhkan sentimen kedaerahan. Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang dalam mengatasi permasalahan di bidang pendidikan, namun harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan nasional. Dalam pengertian ini, desentralisasi

---

<sup>14</sup> Dayat Hidayat, "KEBIJAKAN DESENTRALISASI BIDANG PENDIDIKAN," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 4, no. 3 (2007): 07–07, <https://doi.org/10.31113/jia.v4i3.399>.

<sup>15</sup> Hidayat.

pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya diri yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri.<sup>16</sup>

### **Implementasi manajemen berbasis madrasah pada pembiayaan**

Dalam proses pengelolaannya, madrasah dapat mengeksplorasi diri atau melakukan otonomi pada berbagai bidang, salah satunya contohnya manajemen berbasis madrasah terimplementasi pada sektor keuangan atau pembiayaan, baik itu dari segi pengelolaannya maupun strategi pencarian sumber biaya tersebut.<sup>17</sup> Dalam hal ini salah satu contoh madrasah yang dinilai baik dalam pembiayaannya yaitu Madrasah Pembangunan Ciputat Tangerang.

Dalam pengelolaannya pada tahun 2016, Madrasah ini menetapkan 5 Sumber pembiayaan, yaitu: 1) menetapkan sumbangan dalam jumlah tertentu bagi siswa yang diterima di madrasah tersebut, biaya ini dialokasikan untuk dana investasi dalam pembangunan gedung dan pengadaan prasarana yang tahan lama; 2) mewajibkan siswa untuk membayar SPP bulan yang jumlahnya lebih tinggi dibanding madrasah di sekitar. Dana ini nantinya dipergunakan untuk dana operasional bulanan, dan secara lebih khusus untuk mengkover honor/gaji pendidik dan tenaga kependidikan; 3) menerima bantuan dana dari pemerintah dalam bentuk dana BOS; 4) setiap tahun ajaran baru siswa diwajibkan membayar uang tahun ajaran baru. Dana ini diperuntukan untuk seragam, buku-buku dan kegiatan ekstrakurikuler; 5) dana paket bantuan (tentatif tergantung pihak sponsor yang memberikan bantuan program).<sup>18</sup> Jenis, Sumber dan Alokasi Pembiayaan Pada Madrasah Ciputat Pembangunan terlihat pada gambar dibawah ini.

---

<sup>16</sup> Hidayat.

<sup>17</sup> Iwan Sopwandin et al., "Madrasa Financing Management," *TADBIR MUWAHHID* 3, no. 2 (October 29, 2019): 195, <https://doi.org/10.30997/jtm.v3i2.1963>.

<sup>18</sup> Muhamad Murtadlo, "STRATEGI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA MADRASAH SWASTA UNGGULAN," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, April 30, 2016, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>.

## Manajemen Berbasis Madrasah sebagai Bentuk Desentralisasi Pendidikan

Jenis Biaya	Asal	Penggunaan Biaya	Prosentase cover area	Peruntukan
Uang Pangkal Siswa Baru	Orang Tua	Biaya Investasi	100 %	Pembangunan Gedung Pemeliharaan Gedung Peralatan Permanen Pemeliharaan Peralatan Permanen
Dana BOS	Pemerintah	Biaya Operasional		14 item penggunaan dana BOS yang direkomendasikan Kemdikbud.)
SPP/ Bulan	Orang Tua		85 %	Gaji/honor (70 %) Pengembangan SDM Operasional lainnya
Uang Tahun Ajaran Baru	Orang Tua	Biaya Tambahan	100 %	Seragam Buku-buku Kegiatan Ekstra Kurikuler
Dana Paket Bantuan	Sponsor: Pemerintah/ Swasta	Biaya Program	100 %	Sesuai dengan Program Sponsor

Gambar 1.

Sumber dan Alokasi Pembiayaan Madrasah Pembangunan Ciputat

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dana bos diperuntukan hanya 85% bagi operasional, selebihnya digunakan sebagai investasi. Hal tersebut sesuai dengan penataan dimensi manajemen berbasis madrasah yang pola lama menghabiskan semua uang/dana tetapi pola baru digunakan seefisien mungkin.

Alternatif lain untuk mewujudkan madrasah mandiri dalam hal pembiayaan ialah dapat melalui dana wakaf. Sejarah mengatakan bahwa masalah pembiayaan lembaga pendidikan ternyata telah mendapat perhatian yang besar dari para penyelenggara pendidikan maupun pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung di dalamnya. Dalam praktiknya waqaf merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan pada masa keemasan negara-negara islam. Sebagai salah satu alternatif pendanaan pendidikan, wakaf menjadi seperti sebuah wadah yang terorganisir serta menjadi model di masa Abbasiyah.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Irawati Dewi et al., "IMPLEMENTASI DANA ZISWAF DALAM PENDIDIKAN ISLAM" 04, no. 01 (2020): 13.

## Kesimpulan

Manajemen berbasis Madrasah merupakan poliarasi yang sangat efektif bagi kemajuan lembaga, karena dengan begitu madrasah bisa mengembangkan dan mengelola segala hal termasuk salah satunya didalam pembiayaan. Madrasah Pembangunan diatas merupakan salah satu contoh madrasah yang menerapkan manajemen berbasis madrasah dalam hal pembiayaan dengan sangat baik. Manajemen Berbasis Madrasah ialah buktinya nyata dari desentralisasi bidang pendidikan, sehingga dampak yang dirasakan sangat signifikan bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan, baik jenjang pendidikan dasar, menengah maupun jenjang pendidikan tinggi

## Daftar Rujukan

- Alwi, Toto, Saipul Annur, and Ramdhan Firdaus. "Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Al-Hikam* 2, no. 2 (2021).
- Aziz, Ahmad Zaini. "Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah." *El-Tarbawi* 8, no. 1 (December 31, 2015): 69–92. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art5>.
- Dewi, Irawati, Iqbal Bukhori, Iwan Sopwandin, and Ara Hidayat. "Implementasi Dana Ziswaf dalam Pendidikan Islam" 04, no. 01 (2020): 13.
- Ervannudin, Nur, and Bimo Wahyu Widodo. "Desentralisasi Pendidikan dan Peran Aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas." *Jurnal Penelitian* 10, no. 1 (March 27, 2016). <https://doi.org/10.21043/jupe.v10i1.866>.
- Fauziah, Mutiara, Zainuddin Zainuddin, Ujang Muhajir, and Iwan Sopwandin. "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah Berbasis Pendekatan Kolaboratif Dan Kekeluargaan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru." *Tadbir Muwahhid* 4, no. 2 (2020): 117. <https://doi.org/10.30997/jtm.v4i2.2879>.
- Hidayat, Dayat. "Kebijakan Desentralisasi Bidang Pendidikan." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 4, no. 3 (2007): 07–07. <https://doi.org/10.31113/jia.v4i3.399>.
- Irawan, Irawan. "Paradigma Keilmuan Manajemen Pendidikan Islam." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (February 11, 2017): 297–315. <https://doi.org/10.14421/manageria.2016.12-07>.

## Manajemen Berbasis Madrasah sebagai Bentuk Desentralisasi Pendidikan

- Moto, Maklonia Meling. "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran dalam Dunia Pendidikan." *Indonesian Journal of Primary Education* 3, no. 1 (June 30, 2019): 20–28. <https://doi.org/10.17509/ijpe.v3i1.16060>.
- Munajat, Nur. "Kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam." *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.14421/albidayah.v8i2.74>.
- Murtadlo, Muhamad. "Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Swasta Unggulan." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, April 30, 2016. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>.
- Sopwandin, Iwan. *Manajemen Madrasah Teori dan Strategi Pengelolaan Madrasah di Era Digital*. Cv Widina Media Utama, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/567035/>.
- Sopwandin, Iwan, M Reza Atqia, Nursal Fathoni, and Ara Hidayat. "Madrasa Financing Management." *Tadbir Muwahhid* 3, no. 2 (October 29, 2019): 195. <https://doi.org/10.30997/jtm.v3i2.1963>.
- Sumual, Shelty Deity Meity. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran." *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 12, no. 1 (April 30, 2023): 95. <https://doi.org/10.24036/jbmp.v12i1.122687>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (n.d.).
- Wahyuningrum, MM. "Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dan Desentralisasi Pendidikan pada Era Otonomi Daerah." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. II (2006): 41–49.